

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Bukit Tangkeban Kabupaten Pematang**

Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Bukit Tangkeban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 19 Tahun 2016) meskipun masih terdapat beberapa aktivitas dan aspek kepariwisataan yang belum optimal sesuai tujuan kebijakan yang dituangkan menjadi program-program yang terdapat pada pasal-pasal dalam kebijakan tersebut. Adapun aspek yang perlu dioptimalkan kembali adalah aspek target dan aspek lingkungan sementara aspek ketepatan kebijakan dan aspek ketepatan pelaksana sudah optimal.

Kekurangan dari aspek target adalah belum semua pelaku wisata menerapkan sapta pesona meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Sosialisasi juga dilaksanakan secara tidak merata. ketepatan lingkungan yakni terdapat penolakan terhadap kebijakan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk penolakan mendukung pembangunan destinasi wisata Bukit Tangkeban pada masa perintisan.

##### **4.2.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Bukit Tangkeban Kabupaten Pematang**

Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Bukit Tangkeban tidak lepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat keberjalanan implementasi tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan implementasi ini yaitu (1) Komunikasi, komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar implementor kebijakan sudah baik meskipun sempat ada hambatan. Kompromi antar implementor kebijakan mempermudah implementasi kebijakan, (2) Disposisi, seluruh implementor kebijakan menyatakan setuju kecuali masyarakat. Namun dengan pendekatan yang intensif kini masyarakat sudah mendukung. Adanya kepentingan dan kebutuhan terhadap manfaat dari destinasi wisata membuat implementor kebijakan terutama para perintis destinasi wisata Bukit Tangkeban memaksimalkan perannya, (3) Struktur birokrasi, sudah tepat dan sudah terdapat SOP dan secara global SOP sudah dilaksanakan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sedangkan faktor pengambatnya adalah sumber daya. Kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan masih minim sehingga perlu edukasi dan adaptasi yang cukup tinggi untuk bisa bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Sumber daya manusia di Dinas Pariwisata sudah cukup dari segi tupoksi namun terdapat masalah terkait target kinerja dan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan kepariwisataan atau Ripparkab Pematang Lahat tahun 2017-2025. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan sementara anggaran utama untuk pengembangan destinasi wisata Bukit Tangkeban adalah pendapatan daripada destinasi wisata itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjawab rumusan masalah penelitian yakni implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Bukit Tangkeban secara global sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan terdapat faktor pendorongnya yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi sementara faktor penghambatnya adalah sumber daya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan Bukit Tangkeban, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu pelatihan SDM kepariwisataan yang lebih intensif dan massif, agar kompetensi SDM di destinasi wisata Bukit Tangkeban dapat lebih bersaing dengan destinasi wisata lainnya. SDM kepariwisataan yang kompeten berdampak pada kenaikan jumlah wisatawan yang bermuara pada kemajuan destinasi wisata.
- b. Perlu diversifikasi pelatihan ekraf secara intensif guna meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam mendayagunakan produksi lokal. Pelaku wisata dan masyarakat yang berusaha masih kesulitan untuk menyetarakan kualitas produk di pasar sehingga kuantitas produksi hanya dalam jumlah sedikit untuk meminimalisir risiko kerugian.
- c. Perlu sosialisasi secara langsung dan berkala mengenai kebijakan pembangunan kepariwisataan (Ripparkab) kepada pelaku wisata dan masyarakat guna menjadi dasar dan arah kebijakan kegiatan

pariwisata. Terdapat kerancuan mengenai sosialisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan sudah dilakukan atau belum.

- d. Perlu merekonstruksi bagi hasil pendapatan wisata, agar postur anggaran untuk kebutuhan operasional lebih tercukupi guna peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata. Sebab yang sering terjadi adalah kebutuhan lebih tinggi daripada penghasilan.
- e. Perlu menyelenggarakan promosi yang efektif secara kontinu, untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Peneliti menyarankan seluruh pelaku wisata dan masyarakat memaksimalkan promosi di media sosial secara berkesinambungan dan menambahkan terjemahan ke Bahasa Inggris untuk mempermudah wisatawan manca negara.